

Daftar Pustaka

A. Buku

Zaeni, Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Hadisoepipto, Hartono, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Santoso, Djohari, 1983, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet: Ketiga, UI-Press, Jakarta.

, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Pamudji, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, UI Press, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanityo, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sumatdjo, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

B. Kamus

Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

C. Internet

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Presiden tetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional*, diakses dari <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>, pada 05 November 2021, Pukul 14.56 WIB.

, “*Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional*”, <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkancovid19-sebagai-bencana-nasional>, diakses 18 Oktober 2021, Pukul 10.03 WIB.

, “*Definisi Bencana*”, <https://bnpb.go.id/definisi-bencana>, diakses 18 Oktober 2021, Pukul 10.32 WIB.

- DA, “*Usulan Konsultan Ketenagakerjaan Cegah PHK Massal Dampak Covid-19*”
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e93f486eb20d/usulan-konsultan-ketenagakerjaan-cegah-phk-massal-dampak-covid-19/>, diakses 18 Oktober 2021, Pukul 15.03 WIB.
- Devita, “*Dapatkan Covid-19 Dianggap Peristiwa Forcen Majeure Dalam Kontrak?*”,
<https://irmadevita.com/2020/dapatkan-covid-19-dianggap-peristiwa-force-majeure-dalam-kontrak/>, diakses
18 Oktober 2021, Pukul 11.20 WIB.
- Fauzia, “*Menaker: Akibat Corona 150.000 Pekerja Kena PHK*”
<https://money.kompas.com/read/2020/04/12/062842226/menaker-akibat-corona-150000-pekerja-kena-phk>, diakses 18 Oktober 2021, Pukul 13.03 WIB.
- Harjanto, “*Pandemi COVID-19 Bukan Force majeure, Simak Penjelasan Pakar Hukum*”,
<https://kabar24.bisnis.com/read/20200415/15/1227419/pandemi-covid-19-bukan-force-majeure->, diakses 18 Oktober 2021, Pukul 10.56 WIB.
- Haliem, “*Apakah pandemi Covid-19 sudah masuk kategori force majeure? Ini kata pengamat hukum*”,
<https://nasional.kontan.co.id/news/apakah-pandemik-covid-19-sudah-masuk-kategori-force-majeur-ini-kata-pakar-hukum>, diakses 18 Oktober 2021, Pukul 14.03 WIB.
- Harnowo, “*Wabah Corona sebagai Alasan Force majeure dalam Perjanjian*”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e81ae9a6fc45/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian/>, diakses 18 Oktober 2021, Pukul 14.00 WIB.
- Katadata.co.id, *Dampak Penetapan Status Bencana Nasional Covid-19 terhadap Anggaran*, diakses dari: <https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5e9a41c97e9e4/dampak-penetapan-status-bencana-nasional-covid-19-terhadap-anggaran>, pada 05 November 2021, Pukul 15.00 WIB.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “*Tanya Jawab Coronavirus Disease (COVID-19) - QnA Update 6 Maret 2020*”,
<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/tanya-jawab-coronavirus-disease-covid-19-qna-update-6-maret-2020>, diakses 18 Oktober 2021, Pukul 11.34 WIB.
- Rizki, “*Penjelasan Prof Mahfud Soal Force majeure Akibat Pandemi Corona*”,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona>, diakses 18 Oktober 2021, Pukul 11.23 WIB.
- Ramon, *Keadaan Memaksa (Overmacht) Dalam Hukum Perdata*, diakses dari
<https://Tiarramon.Wordpress.Com/2020/05/11/Keadaan-Memaksa-Overmacht-Dalam-Hukum-Perdata/>, pada tanggal 04 November 2021, pukul 13.00 WIB.
- Siregar, Zahra, “*Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force majeure, Apakah Bisa?*”,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>, diakses 18 Oktober 2021, Pukul 12.03 WIB.
- Thabroni, “*Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah, dan Macam.*” Diakses dari:
<https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>, pada 17 November 2021, Pukul 12.23 WIB.

World Health Organization, *Pertanyaan dan Jawaban Terkait Coronavirus*, diakses dari <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>, pada tanggal 20 Oktober 2021, pukul 21.00 WIB.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Nomor: LN.2003/NO.39, TLN NO.4279, LL SETNEG.

Undang-undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Lembaran Negara Nomor: LN 2004/NO.6. TLN No.4356, LL SETNEH

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Nomor: LN.2007/NO.66, TLN NO.4723, LL SETNEG

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Nomor: LN.2020/No.245, TLN No.6573.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Lembaran Negara Nomor: LN.2021/No.45, TLN No.6647.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan bencana Nonalam Penyebaran Corona Pandemi Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.